

Implementasi Kebijakan Kampung KB di Kabupaten Banyuwangi (Studi pada Desa Jambewangi yang Mendapatkan Gelar sebagai Kampung KB Percontohan Tingkat Provinsi dan Nasional di Tahun 2019)

Dimas Imaniar¹, Leni Vitasari²

^{1,2} Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

e-mail: dimasimaniars@gmail.com¹, leni_vita@untag-banyuwangi.ac.id²

Abstrak

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama jajarannya dalam hal ini direpresentasikan sebagai *context setter* dalam implementasi kebijakan kampung KB di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif, melalui pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan dari ke-4 variabel dalam pengukuran Efektivitas Pelaksanaan Kampung KB di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi di ketahui 2 variabel telah terlaksana dengan baik yaitu pada variabel Ketepatan Sasaran Program dan Sosialisai Program, sedangkan 2 variabel lainnya yaitu Keberhasilan Tujuan Program, dan Evaluasi Program belum berjalan dengan maskimal. Hal ini di karenakan Kurangnya jumlah SDM yang terlibat dalam pelaksanaan kampung KB, kurangnya anggaran dana, waktu pelaksanaan program yang relatif singkat, serta kurangnya partisipasi kelompok kerja kota dalam evaluasi program.

Kata kunci: *Kampung KB, Implementasi Kebijakan, Banyuwangi*

Abstract

The Banyuwangi Regency Government and its staff, in this case, are represented as context setters in implementing family planning village policies in Banyuwangi Regency. This study used qualitative research methods, through a descriptive approach. The results of this study indicate that of the 4 variables in measuring the Effectiveness of the Implementation of Family Planning Villages in Jambewangi Village, Sempu District, Banyuwangi Regency, it is known that 2 variables have been implemented well, namely the Accuracy of Program Targets and Program Socialization, while the other 2 variables are the Success of Program Objectives, and Program evaluation has not run optimally. This is due to the lack of human resources involved in the implementation of KB villages, lack of budget funds, relatively short program implementation time, and the lack of participation of city working groups in program evaluation.

Keywords: *Family Planning, Policy Implementation, Banyuwangi*

PENDAHULUAN

Kampung KB dicanangkan dan diresmikan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 di Desa Janawi, Cirebon Jawa Barat. Pada awal pembentukan kampung KB adalah satuan wilayah setingkat dusun. Kemudian pada tahun 2018, ditetapkan bahwa satuan wilayahnya menjadi setingkat desa. Pada tahun 2017 sebanyak 1200 kampung KB telah terbentuk. Termasuk di Jawa Timur, pencaangan awal setiap kabupaten/ kota memiliki satu kampung KB. Hingga pada akhirnya pada tahun 2018, setiap kecamatan di Jawa Timur membentuk kampung KB. Sehingga sampai saat ini kurang lebih terdapat 725 kampung KB berdiri dan terbentuk di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan data dari Perwakilan BKKBN pada tahun 2017 didapatkan bahwa Cakupan peserta KB Aktif Provinsi Jawa Timur mencapai 74,39 % (BKKBN, 2017:11). Angka

cakupan ini meningkat dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 68,79%. Sedangkan untuk KB Baru mengalami penurunan pada tahun 2015 dari 10,6% menjadi 10,4 % pada tahun 2016 (Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, 2017:33-34). Kepesertaan KB di Indonesia masih di dominasi oleh metode Non-MKJP yakni metode suntik (58,4%) dan pil (17,3%). Pulau Madura (Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan) memiliki proporsi terendah akseptor KB aktif berdasarkan jenis kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2015. Proporsi terendah akseptor KB baru berdasarkan jenis kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), menurut Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2015, masih ditempati oleh Pulau Madura (Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan), sedangkan Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa pemakaian kontrasepsi bukan MKJP lebih tinggi bila dibandingkan dengan penggunaan kontrasepsi MKJP. Padahal Couple Years Protection (CYP) MKJP berkisar 3-5 tahun memberikan peluang yang kecil untuk putus pengguna kontrasepsi (0-20%) dibandingkan dengan non-MKJP (20-40%). Couple-years of protection (CYP) merupakan perkiraan perlindungan dari kehamilan yang diberikan oleh alat kontrasepsi selama satu tahun (Kemenkes RI, 2013:4).

Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung pulau Jawa, memiliki luas wilayah 5.782,50 km² atau 578,250 Ha. Secara administratif Kabupaten Banyuwangi terbagi atas 24 Kecamatan, 189 Desa dan 28 Kelurahan. Jumlah Penduduk sebanyak 1.684.985 jiwa, terdiri dari 847.663 jiwa laki-laki dan 837.322 jiwa perempuan kecamatan terpadat terdapat di 3 kecamatan, Kecamatan Banyuwangi merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan sebesar 3.856 jiwa/km². Diikuti oleh kecamatan Giri sebesar 1.401 jiwa/km² dan kecamatan Genteng sebesar 1.102 jiwa/km². Pertumbuhan penduduk yang meningkat berkaitan dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Kepadatan penduduk per wilayah di Kabupaten Banyuwangi perlu mulai diperhatikan, terutama dalam perencanaan persebaran penduduk, tata ruang dan tata guna tanah. Jika ketiga hal ini tidak diperhatikan dengan baik, maka ke depan, Kabupaten Banyuwangi akan menjadi padat dengan implikasi pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Sebagai salah satu syarat pembentukan kampung KB adalah dibentuknya kelompok kerja (pokja) di seluruh tingkatan wilayah. Baik ditingkat provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, hingga tingkat desa. Pokja ini memiliki tugas untuk saling mengambil bagian dalam menjalankan kampung KB di setiap tingkatan wilayah. Berikut para stakeholder dalam pembentukan kampung KB di Banyuwangi:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB), memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi terhadap implementasi kebijakan kampung KB di Banyuwangi terutama Desa Jambewangi.
2. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam Surat Keputusan Camat Sempu dan Kepala Desa Jambewangi memiliki pengaruh yang sangat tinggi serta memiliki kepentingan yang sangat besar.
3. Kader kampung KB dan masyarakat Desa Jambewangi dikelompokkan sebagai stakeholder subject. Memiliki kepentingan atau harapan yang tinggi terhadap program ini. Hadirnya para kader ini tentunya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di kampung KB.
4. Disperta dan Disperinangan sebagai crowd atau stakeholder pendukung. Memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah terhadap program ini. Namun peran dan dukungannya turut mendorong keberhasilan dari program.

Kampung KB Desa Jambewangi di Kabupaten Banyuwangi telah meraih gelar kampung KB percontohan tingkat provinsi dan nasional. Hal tersebut karena kampung KB Desa Jambewangi telah memenuhi 5 kriteria penilaian keberhasilan kampung KB. Kriteria tersebut diantaranya meliputi komitmen yang kuat dari pemangku kebijakan di semua tingkatan, optimalisasi fasilitas dan dukungan mitra/ stakeholder, dan partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah desa. Beberapa kriteria tersebut sangat erat kaitannya dengan peran atau keterlibatan stakeholder atau para pemangku kepentingan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif, melalui pendekatan deskriptif, dengan memfokuskan permasalahan pada pengukuran Efektivitas pelaksanaan program oleh Budiani yang terdiri dari 4 variabel yaitu: Ketepatan Sasaran Program, Sosialisasi Program, Keberhasilan Tujuan Program, dan Evaluasi Program. Penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pembentukan Kampung KB

Pada tahun 2018, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur menggagas perlombaan kampung KB. Kemudian terpilihlah kampung KB Desa Jambewangi Kabupaten Banyuwangi sebagai juara perlombaan kampung KB percontohan tingkat provinsi Jawa Timur. Perlombaan ini menjadi yang pertama di Indonesia. Kemudian di tahun 2019, kampung KB Desa Jambewangi kembali terpilih sebagai nominasi perlombaan kampung KB percontohan tingkat nasional. Kriteria penilaiannya meliputi komitmen yang kuat dari pemangku kebijakan disemua tingkatan, integritas lintas sektor dan integritas program KKBP, optimalisasi fasilitas dan dukungan mitra/ stakeholder, semangat dan dedikasi para pengelola program di lini lapangan (PKB dan PKK), serta partisipasi aktif masyarakat. Pada Juli 2019, kampung KB Desa Jambewangi resmi diumumkan sebagai salah satu juara kampung KB percontohan tingkat nasional dengan kategori pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah daerah serta pengelola program dalam memberikan stimulan untuk mengoptimalkan pemanfaatan segala potensi dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan percepatan pembangunan wilayah yang dimulai dari desa. Hal tersebut sesuai dan tertuang dalam surat penetapan kampung KB percontohan tingkat nasional yang ditandatangani oleh Kepala BKKBN.

Kategori tersebut menggambarkan bagaimana keterlibatan dan peran dari seluruh pemangku kepentingan turut serta mengambil bagian dalam rangka menyukseskan program kampung KB di Desa Jambewangi. Beberapa stakeholder yang terlibat dalam kampung KB Desa Jambewangi tergabung dan termasuk dalam susunan kelompok kerja di berbagai tingkatan. Mulai dari kelompok kerja kampung kb tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa turut berperan dan bersama-sama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mendukung kampung KB Desa Jambewangi. Stakeholder yang terlibat, tidak hanya berasal dari unsur kedinasan yang mengurus keluarga berencana saja. Terdapat pula dari unsur luar, diantaranya adalah unsur Dinas Kesehatan, IDI, IBI, PKK, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Bina Marga, dan lain sebagainya.

Keberhasilan kampung KB Desa Jambewangi Kabupaten Banyuwangi menarik untuk dikaji lebih lanjut. Terutama dalam hal siapa saja stakeholder yang terlibat, dan peranan seperti apa yang dimainkan stakeholder tersebut dalam proses implementasi kebijakan kampung KB tersebut. Predikat kampung KB percontohan tingkat nasional diperoleh juga melalui proses yang tidak mudah. Komitmen dan juga koordinasi yang dijalankan oleh seluruh stakeholder yang terlibat dapat menghantarkan ke posisi seperti sekarang ini. Tentu hal tersebutlah yang melatarbelakangi dipilihnya kampung KB Desa Jambewangi sebagai kampung KB percontohan dan dapat memberi contoh kampung KB di wilayah lain.

Input Program Kampung KB

Kampung KB merupakan program bersama dan milik kita bersama. Sehingga kampung KB tidak dapat berjalan dengan stakeholder yang terkait program KB saja. Melainkan harus melibatkan dan menjalankan koordinasi dengan lintas sektor, guna mendukung pelaksanaan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BKKBN dalam petunjuk pelaksanaan kampung KB, skema model penggarapan kampung KB memungkinkan adanya keterlibatan lintas sektor terhadap program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Keterlibatan lintas sektor guna mendorong program-program yang ada di kampung KB dapat berjalan dengan baik. Beberapa fasilitas atau bantuan telah diberikan oleh

beberapa stakeholder yang terlibat dalam kampung KB. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Fasilitasi atau dukungan yang diberikan oleh lintas sektor dan mitra kerja, menunjukkan peran aktif dari lintas sektor dan mitra kerja kampung KB. Manfaat dari fasilitasi dan bantuan yang diberikan tentu dirasakan oleh masyarakat. Adanya fasilitas dan dukungan dari stakeholder, lintas sektor dan mitra kerja tersebut, mendukung penguatan kampung KB di Desa Jambewangi. Sehingga ditetapkan sebagai kampung KB percontohan tingkat provinsi dan nasional.

Proses Pelaksanaan Program Bina Keluarga Remaja

Bina Keluarga Remaja BKR dalam melaksanakan program disesuaikan dengan kebutuhan para orangtua dalam menghadapi permasalahan remaja yang sedang banyak diperbincangkan. Program yang akan dilaksanakan diantaranya adalah pertemuan rutin, FGD, penyuluhan atau sosialisasi. Ketiga program yang diselenggarakan oleh BKR untuk pencegahan mengenai kenakalan remaja antara satu dan lainnya saling berkaitan. Berkaitannya antara program tersebut tujuannya agar tindakan pencegahan yang dilakukan Bina Keluarga (BKR) dapat mencegah remaja dari berbagai permasalahannya seperti kenakalan remaja. Kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing program tersebut diantaranya adalah : 1. Pertemuan rutin Pertemuan rutin dilaksanakan setiap 2 kali dalam sebulan, pertemuan ini dihadiri oleh pengurus, kader dan anggota BKR dari keempat kecamatan yang ada di Kota Parepare. Kegiatan ini pada saat pertemuan adalah diskusi. Dalam kegiatan diskusi dipimpin oleh salah satu pengurus atau kader BKR. Topik yang dibahas dalam diskusi ini yakni mengenai kenakalan remaja serta solusi untuk penyelesaiannya. 2. FGD Kegiatan FGD diikuti oleh seluruh masyarakat/ orang tua yang memiliki remaja, baik terdaftar sebagai anggota BKR maupun tidak. Dalam penyelenggaraan program ini BKR bekerjasama dengan Dinas PPKB memfasilitasi narasumber yang akan mengisi pada saat kegiatan tudang sipulung. Topik yang dibahas dalam kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan pada saat diskusi yang dilaksanakan ketika pertemuan rutin. Pada program FGD diawali dengan pemaparan materi dari narasumber, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan mengenai dampak jangka panjang maupun jangka pendek dari topik yang dibicarakan, selanjutnya yaitu diskusi. Pada saat diskusi para orangtua berkonsultasi mengenai permasalahan remaja yang dihadapinya, hasil dari diskusi kemudian ditemukan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. 3. Penyuluhan atau sosialisasi. Dalam program penyuluhan atau sosialisasi bekerjasama dengan petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), petugas PLKB dijadikan narasumber dalam program ini. Materi atau topik yang dibahas berkaitan dengan materi pada saat program sebelumnya, yaitu sama-sama bertujuan untuk mencegah kenakalan remaja, namun selain membahas hal tersebut juga menyampaikan materi yang berhubungan dengan 8 fungsi keluarga, hal tersebut dilakukan agar para orangtua lebih mengetahui cara membina dan mendidik anak remaja dengan baik, sehingga akan memberikan benteng yang kuat dalam keluarga agar anak remaja tidak terjerumus pada hal negatif seperti seksualitas, HIV atau AIDS, NAPZA ataupun hal negatif lainnya.

Output Program Kampung KB

Program ini dijalankan oleh stakeholder terkait secara bersama-sama diseluruh tingkatan. Sebagai salah satu syarat pembentukan kampung KB adalah dibentuknya kelompok kerja (pokja) diseluruh tingkatan wilayah. Baik ditingkat provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, hingga tingkat desa. Pokja ini memiliki tugas untuk saling mengambil bagian dalam menjalankan kampung KB di setiap tingkatan wilayah. Koordinasi setiap pokja digawangi oleh kepala daerah beserta jajarannya. Sehingga komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder di semua tingkatan wilayah sangat penting adanya. Komitmen dari stakeholder terkait dapat ditunjukkan melalui berbagai macam bentuk dukungan. Dukungan yang diberikan dapat berupa bantuan yang berupa metril atau bantuan

fisik, dapat juga bantuan non fisik atau kontribusi tenaga dan pikirannya demi keberhasilan kampung KB.

Komitmen beberpa pemangku kepentingan pada implementasi kebijakan kampung KB di Desa Jambewangi dapat dilihat dari laporan dukungan anggaran tahun 2016 hingga 2019. Terdapat berbagai bentuk jenis dukungan, baik materil maupun non materil. Dukungan materil dan nom materil dari berbagai stakeholder dan lintas sektor, menunjukkan komitmennya terhadap program ini. Berikut adalah data dukungan pada kampung KB Desa Jambewangi.

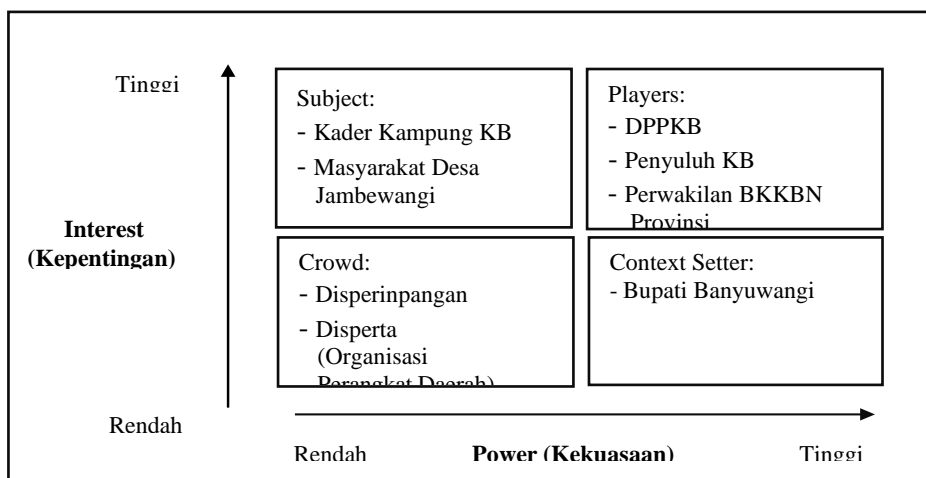
Tabel 1. Data Dukungan Kampung KB Desa Jambewangi Tahun 2016-2019

No	Pemangku Kepentingan	Bentuk/ Nominal Dukungan
1	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur	Rp 20.000.000
2	Dinas Pemberdayaan perempuan dan KB	Rp. 117.000.000
3	Dinas Pertanian	Rp 2.500.000.000
4	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	Rp 50.000.000
5	Pemerintah Desa Jambewangi	Rp 456.000.000
6	Universitas 17 Agustus Banyuwangi	Pendataan keluarga
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pelayanan pembuatan akta kelahiran

Sumber: Laporan Dukungan Kampung KB Desa Jambewangi Tahun 2016-2019

Capaian Peningkatan Peserta KB Aktif Modern

Menurut Reed dalam Roslinda, menyatakan bahwa analisis pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan tahapan tata cara berikut: pertama, identifikasi siapa saja yang berperan dan memiliki kepentingan, Kedua, mengelompokkan dan mengkategorikan para pemangku kepentingan. Ketiga, adalah meneliti hubungan antar pemangkun kepentingan (Rosalinda, 2012). Sehingga dalam penelitian ini, analisis peran dan hungan antar stakeholder yang merupakan keseluruhan aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan kampung KB di Desa Jambewangi Kabupaten Banyuwangi. Analisis menggunakan teori analisis peran stakeholder dari Bryson adalah dimulai dari mengelompokkan stakeholder yang terlibat kedalam matriks dua kali dua berdasarkan interest (kepentingan) dan power (kekuasaan).



Gambar 1. Implementasi Kebijakan Kampung KB Desa Jambewangi Kabupaten Banyuwangi. Sumber: Sumber: Bryson, John M. 2004. *What Do When Stakeholders Matter: Stakeholder Identification and Analysis Techniques*. Minneapolis: Hubbert H. Humphrey Institute of Public Affairs (diolah penulis)

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama jajarannya dalam hal ini direpresentasikan sebagai context setter dalam implementasi kebijakan kampung KB di Kabupaten Banyuwangi. Dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 188/155/KEP/429.011/2016 tentang Susunan Personalia Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB tingkat kabupaten. Bupati Banyuwangi berperan sebagai pelindung dalam Pokja ini. Hal ini menunjukkan bahwa Bupati memiliki pengaruh yang kuat untuk menentukan arah gerak dan tujuan pelaksanaan program. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB), sebagai leading sector. Karena program ini terkait dengan visi, misi, tugas dan kewenangannya sebagai pengelola program KB. Sehingga DPPKB memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi terhadap implementasi kebijakan kampung KB di Banyuwangi terutama Desa Jambewangi. Memiliki pengaruh kuat karena sebagai ketua pokja dan komando program yang berhubungan dengan KB menjadi kendalanya. Sehingga kepentingannya juga tinggi, karena sukses dan tidaknya program KB di Kabupaten Banyuwangi ditentukan olehnya.

Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam Surat Keputusan Camat Sempu dan Kepala Desa Jambewangi menjabat sebagai sekretaris. Selain itu Penyuluh KB merupakan aparatur BKKBN di lini lapangan. Penyuluh KB ini memiliki pengaruh yang sangat tinggi serta memiliki kepentingan yang sangat besar. Karena kampung KB ini merupakan inovasi kebijakan yang dibuat oleh BKKBN. Komitmen terhadap program kampung KB dapat dilihat saat peran aktif dalam proses pembentukan kampung KB, implementasi bahkan sampai proses persiapan menuju lomba kampung KB tingkat nasional. Segala kegiatan kampung KB, penyuluh KB selalu hadir dan memberikan pemahaman mendalam mengenai kampung KB dan program yang ada didalamnya.

Kader kampung KB dan masyarakat Desa Jambewangi dikelompokkan sebagai stakeholder subject. Memiliki kepentingan atau harapan yang tinggi terhadap program ini. Hadirnya para kader ini tentunya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di kampung KB. Kader adalah sukarelawan yang peduli terhadap kampung KB ini. Dibentuk oleh, dari dan untuk warga masyarakat secara mandiri dan tanpa dibayar guna meningkatkan pemahaman masyarakat melalui berbagai kegiatan yang kreatif dan inovatif. Kader kampung KB juga berjalan untuk mendata keluhan dan permasalahan warga. Kemudian didata dan saat ada diskusi bersama stakeholder kampung KB yang lain dipaparkan dan dicarikan solusi bersama. Kemudian masyarakat desa, memiliki kepentingan tinggi terhadap kampung KB. Guna dapat membantu meningkatkan kesejahteraannya.

Sedangkan Disperinpangan dan Disperta merupakan stakeholder yang memiliki kepentingan dan kekuasaan atau wewenang yang rendah terhadap kebijakan. Posisi dalam Pokja hanya sebagai bidang-bidang yang mendukung implementasi kebijakan kampung KB. Sehingga kedua dinas ini bersama dinas lainnya hanya sebagai stakeholder kelompok crowd. Stakeholder pendukung dalam hal peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Kampung KB Desa Jambewangi di Kabupaten Banyuwangi telah meraih gelar kampung KB percontohan tingkat provinsi dan nasional. Hal tersebut karena kampung KB Desa Jambewangi telah memenuhi 5 kriteria penilaian keberhasilan kampung KB. Kriteria tersebut diantaranya meliputi komitmen yang kuat dari pemangku kebijakan disemua tingkatan, optimalisasi fasilitas dan dukungan mitra/ stakeholder, dan partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah desa. Beberapa kriteria tersebut sangat erat kaitannya dengan peran atau keterlibatan stakeholder atau para pemangku kepentingan.

Stakeholder atau pemangku yang terlibat dalam implementasi kebijakan kampung KB adalah pihak-pihak yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) di masing-masing

tingkatan, baik dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Landasan hukumnya adalah surat keputusan kepala daerah, camat dan kepala desa. Beberapa stakeholder yang terlibat diantaranya: Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Penyuluh KB Kecamatan Sempu, Pemerintah Desa dan Kader Kampung KB. Masing-masing stakeholder dan lintas sektor yang terlibat mempunyai peranan yang berbeda. Peranan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kewenangan yang dimiliki masing-masing.

Penelitian ini selain bertujuan untuk mengetahui siapa saja stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan kampung KB di Desa Jambewangi juga untuk mengetahui peranan dari masing-masing stakeholder tersebut. Dalam rangka untuk mengetahui peranan stakeholder, perlu melakukan analisis mendalam terkait hal tersebut.

Dalam penelitian ini, analisis peran stakeholder menggunakan teori dari Bryson. Bryson menganalisis stakeholder dengan mengelompokkan stakeholder tersebut kedalam matriks dua kali dua berdasarkan interset (kepentingan) dan power (pengaruh) dengan 4 kategori kelompok. Hasilnya adalah sebagai berikut: (1) Bupati Banyuwangi sebagai context setter atau penentu arah kebijakan, sehingga memiliki pengaruh yang tinggi dalam menentukan personalia terkait program ini, (2) Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, DPPKB dan Penyuluh KB sebagai players atau pemain utama dalam kebijakan ini. Memiliki pengaruh dan kekuasaan yang tinggi. Karena memang ketiganya sebagai penanggung jawab untuk menyukseskan program keluarga berencana melalui kampung KB, (3) Kader kampung KB dan masyarakat desa, sebagai subject. Memiliki kepentingan atau harapan yang tinggi terhadap kampung KB guna untuk meningkatkan kesejahteraannya, (4) Disperinangan dan Disperinangan sebagai crowd atau stakeholder pendukung. Memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah terhadap program ini. Namun peran dan dukungannya turut mendorong keberhasilan dari program.

Pengelompokkan stakeholder dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pihak-pihak terkait dalam program yang sedang dijalankan dalam implementasi kebijakan kampung KB meliputi peran-perannya, kepentingannya, dan dampak yang ditimbulkan dari dilaksakannya program kebijakan tersebut. Setiap stakeholder tersebut memiliki tanggung jawab masing-masing, yang selanjutnya bersama-sama mempunyai tujuan yang sama untuk mengelola program kebijakan tersebut dengan memanfaatkan sumberdaya yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2017
- Bryson, John M. 2004. *What Do When Stakeholders Matter: Stakeholder Identification and Analysis Techniques*. Minneapolis: Hubbert H. Humphrey Institute of Public Affairs
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyuwangi
- Freeman, R. E. 1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman Publishing.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif . Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Horison, Lisa. 2009. *Motodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana
- Roslinda, Emi. 2012. *Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat*. JMHT Vol. XVIII Ary, D., Jacobs, L.C. & Razavieh, A. 1976. *Pengantar Penelitian Pendidikan*. Terjemahan oleh Arief Furchan. 1982. Surabaya: Usaha nasional